

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dari bab satu hingga empat, hasil pengolahan data NVivo, serta analisa SSM, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang diturunkan menjadi pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Asertivitas Cina berpengaruh pada kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Laut Cina Selatan baik pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Seiring dengan meningkatnya asertivitas Cina dari tahun ke tahun, terjadi perubahan pola kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Pada masa Presiden Yudhoyono, asertivitas Cina baru saja mulai terjadi di Laut Cina Selatan dan Indonesia memberikan penyesuaian terhadap fenomena tersebut. Penyesuaian ini dilakukan dengan meningkatkan peran aktif Indonesia di dalam forum-forum multilateral, penggunaan instrumen kerjasama bilateral dengan negara-negara *great powers*, hingga kebijakan-kebijakan unilateral. Pada masa Presiden Joko Widodo, asertivitas Cina di Laut Cina Selatan meningkat dengan pesat. Pada masa awal administrasi Presiden Joko Widodo, Indonesia lebih sering merespon asertivitas Cina melalui cara-cara yang unilateral dan bilateral. Peningkatan asertivitas Cina di dalam dua masa kepresidenan tersebut mengancam pertahanan negara Indonesia dan juga keamanan maritimnya. Dari sisi pertahanan negara, peningkatan asertivitas Cina sebagai ancaman eksternal memungkinkan untuk mengancam keamanan nasional Indonesia dan juga pembangunan nasionalnya. Ditinjau dari

keamanan maritim Bueger (2015), asertivitas Cina sangat merugikan Indonesia di dua sisi, pertama terkait dengan *national security*, dan kedua terkait *economic development*.

2. Politik birokrasi adalah fenomena yang wajar, termasuk di dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia. Politik birokrasi ini berpengaruh pada kebijakan luar negeri Indonesia. Pada masa Presiden Yudhoyono, politik birokrasi memungkinkan terjadi karena kementerian tidak memiliki visi dan misi yang sama dengan Presiden. Walaupun demikian, ada sistem “diwapreskan” dan pemanfaatan sistem kementerian coordinator untuk meredam konflik birokrasi, terutama terkait perumusan kebijakan luar negeri. Tidak seperti masa sebelumnya, pada masa Presiden Joko Widodo, setiap kementerian telah disesuaikan visi misinya dengan visi misi Presiden. Walaupun begitu, kepentingan personal birokrat dan Presiden memiliki signifikansi yang tinggi dalam perubahan kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam sikap Indonesia yang tidak lagi menjaga kohesivitas ASEAN pada masa awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pada masa Presiden Joko Widodo, Indonesia masih memanfaatkan sistem kementerian koordinator sebagai sistem pengambilan keputusan dan pengaturan politik birokrasi. Meskipun politik birokrasi adalah hal yang biasa dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, namun apabila hal ini tidak terkelola dengan baik, politik birokrasi memungkinkan berubah menjadi fragmentasi politik antar birokrat yang konfliktual. Kondisi ini menjadi destruktif dan merugikan Indonesia menimbang fakta bahwa Indonesia sedang menyaksikan peningkatan asertivitas Cina di dalam konflik Laut Cina Selatan yang mengancam pertahanan negara dan keamanan maritim Indonesia.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran teoretis dan saran praktis yang diajukan sesuai dengan masalah yang muncul pada latar belakang penelitian dengan harapan isu yang diangkat dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak regulator dan operator, dan secara akademis dapat dilanjutkan dalam penelitian selanjutnya:

1. Dalam saran teoritis, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menganalisis keterpautan antara modal internasional dan ancaman internasional sebagai satu kesatuan yang berpengaruh pada kebijakan luar negeri suatu negara. Penelitian selanjutnya dapat dimulai dengan asumsi bahwa Cina menggunakan dua instrumen sekaligus dalam menghadapi konflik Laut Cina Selatan, yaitu instrumen ekonomi melalui BRI tetapi di saat yang sama menggunakan cara-cara yang asertif bahkan agresif. Pertanyaannya adalah, sejauh mana suatu negara akan mengedepankan kepentingan ekonominya padahal di saat yang sama negara tersebut perlu mengedepankan kepentingan kedaulatan dan pertahanannya? Atau, sejauh mana suatu negara akan mengedepankan kepentingan kedaulatannya padahal di saat yang sama negara tersebut perlu mengedepankan kepentingan ekonominya? Bila dilakukan, penelitian tersebut akan melengkapi *puzzle* penelitian ini karena politik birokrasi di Indonesia memungkinkan terjadi karena dilema prioritas kepentingan nasional antar birokrat—selain sistem pengambilan kebijakan luar negeri.
2. Dalam saran level praktis, penelitian ini memiliki saran yang dibagi menjadi dua, yaitu kepada regulator dan operator selaku *owners* untuk kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Laut Cina Selatan.

- a. Regulator: Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan dapat berperan besar bagi Indonesia dalam mengimplementasikan dan memfasilitasi *strategi hedging*, melakukan *engagement* dengan Cina, intensifikasi hubungan dengan Amerika Serikat dan ASEAN. Kementerian Luar Negeri dapat mempererat kerjasama-kerjasama dalam spektrum yang luas terhadap negara-negara great powers, Cina, Amerika Serikat, dan menjaga soliditas ASEAN. Kementerian Pertahanan dapat memaksimalkan forum ADMM, ARF, ataupun EAS dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan. Kementerian koordinator dapat berperan besar dalam melakukan *internal balancing*. Dengan perannya yang besar dalam bidang koordinasi dan pengendalian, kementerian koordinator memungkinkan untuk menjadi penjuru dalam melakukan *internal balancing* seperti pembangunan Natuna, memastikan tercapainya MEF dengan kerjasama dengan Kementerian Pertahanan, hingga terorkestrasinya kebijakan keamanan Indonesia. Di dalam konteks terakhir ini, kementerian koordinator berarti berperan dalam memastikan politik birokrasi di dalam kebijakan luar negeri Indonesia berbasis *bureaucratic consensus seeking*. Hal ini dikarenakan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan keamanan tidak akan tepat sasaran bila terjadi friksi antar elit politik di dalam pemerintahan. Selain memaksimalkan peran kementerian koordinator dalam manajemen politik birokrasi, regulator dengan pertimbangan Presiden juga dapat membentuk *National Security Council*.
- b. Operator: TNI AL dapat berperan besar dalam melakukan diplomasi maritim dan bekerja sama dengan

Angkatan Laut negara-negara *great powers* sehingga meningkatkan kekuatannya dan mengembangkan *confidence building*. Diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh TNI AL ini adalah bagian dari strategi *hedging* di mana suatu negara melebarkan jaringan-jaringan diplomasinya dengan negara lain. Selain dalam diplomasi, TNI AL juga dapat berperan dalam melakukan patroli yang rutin di Laut Natuna Utara untuk meningkatkan *sea control* dan *sea denial*. Bagi Bakamla, institusi ini dapat melakukan peningkatan patroli untuk menciptakan keamanan maritim di wilayah laut Indonesia secara lebih luas, dan Laut Natuna Utara secara lebih khusus. Bakamla juga dapat bekerjasama dengan *coast guard* negara asing untuk meningkatkan profesionalitas dan kapabilitas institusi ini sebagai salah satu garda terdepan keamanan maritim. Bagi Kogabwilhan I, institusi ini dapat melakukan latihan-latihan antar matra yang terpadu, terukur, dan terjadwal di Laut Natuna Utara, untuk memberikan efek *deterrence* bagi negara asing sekaligus memperlihatkan bahwa Indonesia dapat melakukan kebijakan-kebijakan unilateralistik. Dari semua saran yang diberikan kepada operator di atas berkaitan dengan upaya Indonesia dalam melakukan *internal balancing* sekaligus strategi *hedging*. Dalam subfokus politik birokrasi, setiap operator harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang akan diimplementasikan telah berkoordinasi dengan regulator dan menciptakan saluran komunikasi yang kuat dengan operator lainnya. Kedua hal di atas memungkinkan untuk mengurangi politik antar birokrat yang konfliktual, selain juga

perbaiki sistem pengambilan kebijakan luar negeri itu sendiri.